

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARTRIEN ADHIPUTRI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **922046**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 694 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.470.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/50 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 760.000.000
4. Bangunan Seluas 21.17 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 410.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI SUV Tahun 2016, HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000
2. MOBIL, SUZUJI MINIBUS Tahun 2008, HADIAH Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 52.000.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. 2.250.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 678.063.868

F. HARTA LAINNYA

Rp. 1.000.000.000

Sub Total

Rp. 9.520.063.868

III. HUTANG

Rp. 302.060.919

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.218.002.949

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI SARSITO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **419220**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **985.000.000**

1. Tanah Seluas 1227 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
2. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/160 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **227.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **65.000.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **342.689.908**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **1.619.689.908**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.619.689.908

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO HARYATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 473811

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.880.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 155.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 53.600.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 746.063.986

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.834.663.986

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.834.663.986



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELYSA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 212717

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/54 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 286.800.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 800.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
4. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.125.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 156.165.251

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 608.090.251

III. HUTANG Rp. 81.960.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 526.130.251

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Desember 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RETNO DYAH WAHYUNINGSIH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 525611

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.805.000.000

1. Tanah Seluas 950 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 131.000.000
2. Tanah Seluas 404 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 251.000.000
4. Tanah Seluas 3398 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 925 m2/400 m2 di KAB / KOTA
SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 751.000.000
6. Tanah Seluas 961 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 131.000.000
7. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 131.000.000
8. Tanah Seluas 962 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000
9. Tanah Seluas 1585 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 218.000.000

1. MOBIL, DAIHATZU MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000



2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
125.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000
4. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA-X Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
6. MOTOR, KAWASAKI BJ175C Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	960.962.133
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.006.962.133
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.006.962.133

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULISTYANI KUSUMANINGRUM,**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **835165**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **7.392.000.000**

1. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1210 m2/400 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 134 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 469.000.000
4. Tanah Seluas 134 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 469.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.254.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **1.443.000.000**

1. MOTOR, HONDA A1F02N36M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA K1H02N14L0 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



3. MOBIL, HONDA CRV 1.5 CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
515.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
900.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.294.451.597

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 11.189.451.597

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 11.189.451.597

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.